

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi merupakan bagian program Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan yang efisien dan rasional. Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 tahun 2008.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor Tahun 2016 melaporkan capaian kinerja (*performance result*) sesuai dengan rencana kinerja (*performance plan*). Sesuai dengan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2016, Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman berkewajiban melaksanakan kegiatan untuk memacu program prioritas dalam penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kapasitas dan sumberdaya aparatur, peningkatan kualitas pelayanan prima, peningkatan akuntabilitas dan pengawasan serta penilaian kinerja pegawai dan pengembangan kinerja pengembangan instansi.

Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018.

Pada Tahun Anggaran 2016, Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor memberikan kontribusi terhadap pencapaian kebijakan prioritas pembangunan daerah yang ke 4 (empat), yaitu Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Masyarakat. Kontribusi Pencapaian kebijakan tersebut ditandai dengan capaian rata-rata indikator kinerja kunci (IKK) sebesar 113,31 %, dengan predikat kinerja sangat tinggi. Uraian capaian kinerja indikator kinerja kunci tersebut sebagai berikut :

- 1) Persentase Luas Pemukiman yang tertata dari rencana sebesar 8,053%, realisasinya mencapai 8,053 %, atau 100%;
- 2) Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) dari rencana sebesar 61,98 %, realisasinya mencapai 60,14%, atau 97,03%;
- 3) Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan dari rencana sebesar 0,2575, realisasinya mencapai 0,3115, atau 120,97%;
- 4) Mendorong Terbangunnya Cibinong Raya Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yaitu dengan Tersedianya dokumen RTBL dari rencana sebesar 2 dokumen, realisasinya mencapai 3 dokumen atau 150%;
- 5) Lingkungan Pemukiman dari rencana sebesar 3,23%, realisasinya mencapai 0,295 %, atau 190,87%;
- 6) Lingkungan Pemukiman Kumuh dari rencana sebesar 0,23%, realisasinya mencapai 0,295%, atau 69,84%;
- 7) Rasio rumah layak huni dari rencana sebesar 0,2389, realisasinya mencapai 0,2403, atau 100,60%;
- 8) Rumah layak huni dari rencana sebesar 98,25%, realisasinya mencapai 97,57%, atau 99,31%;
- 9) Rasio permukiman layak huni dari rencana sebesar 0,9987, realisasinya mencapai 0,9957, atau 99,70 %;

- 10) Bebas rumah tidak layak huni, dari rencana sebesar 60.623 unit, realisasinya mencapai 56.876 unit, atau 93,82%;
- 11) Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni, dari rencana sebesar 98,25%, realisasinya mencapai 97,57%, atau 99,31%;
- 12) Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau, dari rencana sebesar 72,19%, realisasinya mencapai 67,72%, atau 93,82%.

Pencapaian kinerja dari indikator kinerja kunci di atas, dikontribusikan oleh 8 program dan 76 kegiatan, yaitu :

- 1) Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- 2) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
- 3) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;
- 4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 6) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- 7) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 8) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Hasil pengukuran kinerja sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk tahun 2016 menunjukkan persentase yang memuaskan, meskipun dalam pelaksanaan ditemukan kendala-kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Posisi Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman sebagai instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik sekaligus dinas teknis dituntut harus dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif dan efisien, sederhana, transparan, terbuka, responsif dan adaptif sekaligus

dapat membangun kualitas manusia, meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depan Kabupaten Bogor secara menyeluruh.

Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor secara optimal berupaya mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan cara pencapaian tujuan dan sasaran baik melalui kebijakan, program dan kegiatan yang dikelola pada Tahun Anggaran 2016. Hal ini tidak saja karena telah dapat memanfaatkan sarana/prasarana kerja dan anggaran meski dalam kondisi terbatas, namun juga didukung oleh semangat dan etos kerja melalui pemahaman tugas pokok dan fungsi.

Kedepan pada Tahun Anggaran 2017, diharapkan dengan Dinas Baru Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat meningkatkan kinerja dinas lebih prima dalam rangka pelayanan kepada masyarakat termasuk pencapaian target PAD dapat lebih optimal lagi.